

BAB II

TELAAH LITERATUR

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Teori Agency

Agency theory merupakan hubungan antara agen dan *principal*. Dimana *principal* sebagai pemegang saham dan *agent* sebagai pihak manajemen yang mengelola perusahaan. “Keduanya terikat dalam sebuah kontrak yang dimana *principal* memberikan tanggung jawab kepada *agent* untuk menjalankan perusahaan sesuai dengan apa yang diharapkan *principal*. Di sisi lain, *principal* akan memberikan insentif yang layak pada agen sehingga tercapai kontrak kerja optimal” (Kurniawan dan Yuniarto, 2016). Teori Keagenan berfungsi untuk menganalisa dan menentukan solusi terhadap masalah-masalah yang ada dalam hubungan keagenan antara manajemen dan pemegang saham.

Audit delay menjadi faktor penting dalam pengimpletasian *agency theory*, sebab *audit delay* mempunyai hubungan erat dengan ketepatan waktu publikasi laporan keuangan, karena manfaat laporan keuangan menjadi berkurang apabila tidak disampaikan secara tepat waktu. “Ketepatan waktu menunjukkan rentang waktu antara informasi yang ingin disajikan dengan pelaporan, apabila informasi tersebut tidak disampaikan tepat waktu mengakibatkan nilai dari informasi menjadi berkurang” (Praptika dan Rasmini, 2016).

Berkurangnya nilai informasi yang disampaikan kepada *principal* menimbulkan asimetris informasi, asimetri informasi merupakan ketidak seimbangan informasi akibat distribusi informasi yang tidak sama antara agen dan *principal*. Dalam hal ini pihak agen lebih baik dan banyak mengetahui informasi internal perusahaan secara detail dibandingkan pihak prinsipal yang hanya mengetahui informasi perusahaan secara eksternal melalui hasil kinerja yang dibuat oleh manajemen. “Oleh karena itu, hal ini memerlukan ketepatan waktu mengurangi adanya asimetris informasi antara pihak agen atau manajemen dengan pihak prinsipal atau pemegang saham, sehingga laporan

keuangan dapat disampaikan secara transparan kepada *principal*” (Praptika dan Rasmini, 2016).

Dalam mengelola keuangan perusahaan, auditor diyakini mampu menjembatani kepentingan antara pihak *agen* (manajemen) dengan pihak *principal* (pemegang saham). Menurut Kowanda *et al.*, (2016), “laporan keuangan audit adalah hasil akhir proses akuntansi yang menyediakan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan dan dapat meyakinkan *principal* bahwa laporan keuangan yang disajikan berkualitas”.

2.1.2 Laporan Keuangan

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) NO. 1 yang disahkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), (2018), Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan yaitu untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik dan arus kas. Informasi tersebut, beserta informasi lainnya yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan, membantu pengguna laporan keuangan dalam memprediksi arus kas masa depan entitas dan khususnya, dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya arus kas masa depan (IAI, 2018).

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2021) dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 tentang penyajian laporan keuangan, komponen laporan keuangan yang lengkap terdiri dari:

1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode

Laporan posisi keuangan mencakup penyajian jumlah pos-pos berikut: Aset tetap, Properti investasi, Aset tak berwujud, Asset keuangan, Investasi yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas, Asset biologis, Persediaan, Piutang usaha dan piutang lain, Kas dan setara kas, Total aset yang diklasifikasikan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual dan aset yang termasuk dalam kelompok lepasan uang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual, Utang usaha dan utang lain, Provisi, Liabilitas keuangan, Liabilitas dan aset untuk pajak kini, Liabilitas dan aset pajak tangguhan, Liabilitas yang termasuk dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual, Kepentingan non pengendali disajikan sebagai bagian dari ekuitas, Modal saham cadangan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode

Bagian laba rugi atau laporan laba rugi mencakup pos-pos yang menyajikan jumlah berikut untuk periode: pendapatan, biaya keuangan, bagian laba rugi dari entitas asosiasi dan ventura bersama yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas, beban pajak, jumlah tunggal untuk operasi yang dihentikan. Bagian penghasilan komprehensif lain menyajikan pos-pos untuk jumlah selama periode: pos-pos penghasilan komprehensif lain yang diklasifikasikan berdasarkan sifat dan dikelompokkan sesuai SAK: tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi; dan akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi ketika kondisi tertentu terpenuhi.

3. Laporan perubahan ekuitas selama periode

Laporan perubahan ekuitas mencakup informasi sebagai berikut:

- a. Total penghasilan komprehensif selama periode berjalan, yang menunjukkan secara tersendiri jumlah total yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepada kepentingan nonpengendali.
- b. Untuk setiap komponen ekuitas, dampak penerapan retrospektif atau penyajian kembali secara retrospektif.

- c. Untuk setiap komponen ekuitas, rekonsiliasi antara jumlah tercatat pada awal dan akhir periode, secara tersendiri mengungkapkan masing-masing perubahan yang timbul dari laba rugi, penghasilan komprehensif lain, transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, yang menunjukkan secara tersendiri kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dan perubahan hak kepemilikan atas kepentingan pada entitas anak yang tidak menyebabkan hilangnya pengendalian.
4. Laporan arus kas selama periode
Informasi arus kas menyediakan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas dan kebutuhan entitas dalam menggunakan arus kas tersebut.
5. Catatan atas laporan keuangan, berisi kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain
Catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi spesifik, mengungkapkan informasi yang disyaratkan oleh SAK yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan, dan menyediakan informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan.
6. Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membantu penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mengklasifikasikan pos-pos dalam laporan keuangannya.

Menurut Kieso *et al.* (2018) karakteristik kualitatif laporan keuangan terbagi menjadi dua, yaitu *fundamental quality* dan *enhancing quality*. Suatu informasi dikatakan memenuhi *fundamental quality* jika:

1. Relevan (*Relevance*)

Informasi dikatakan relevan jika informasi keuangan tersebut mampu membuat perbedaan dalam proses pengambilan keputusan. Informasi keuangan dapat membuat perbedaan jika memiliki:

- a. *Predictive value*
Informasi tersebut memiliki nilai yang digunakan oleh investor untuk memprediksi masa depan.
 - b. *Confirmatory value*
Informasi yang membantu pengguna mengkonfirmasi atau memperbaiki ekspektasi awal.
 - c. *Materiality*
Informasi dikatakan material jika salah saji dapat mempengaruhi keputusan pengguna.
2. Penyajian Jujur (*Faithful Representation*)
Informasi dikatakan *faithful representation* jika angka dan deskripsi sesuai dengan yang benar-benar terjadi
- a. *Completeness*, angka-angka dan deskripsi pada informasi keuangan sesuai dengan apa yang terjadi.
 - b. *Neutrality*, perusahaan tidak dapat memilih informasi untuk keuntungan pihak tertentu.
 - c. *Free from error*, informasi yang bebas dari kesalahan akan lebih akurat.
- Enhancing qualities* digunakan untuk membedakan antara informasi yang lebih berguna dan informasi yang kurang berguna. Informasi dikatakan memenuhi *enhancing qualities* jika:
1. Dapat dibandingkan (*Comparability*)
Membandingkan informasi yang diukur dan dilaporkan dalam perlakuan yang sama untuk perusahaan yang berbeda.
 2. Dapat diverifikasi (*Verifiability*)
Terjadi ketika pihak independen mengukur menggunakan metode yang sama dan mendapatkan hasil yang sama.
 3. Tepat Waktu (*Timeliness*)
Menyediakan informasi kepada pengambil keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kapasitasnya untuk mempengaruhi keputusan.

4. Dapat dimengerti (*Understandability*)

Bagaimana pengambil keputusan membuat keputusan dan kemampuan untuk memproses informasi yang dimiliki dan didapatkan dari sumber lain.

Pengguna informasi laporan keuangan dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu (Weygandt *et al*, 2019):

- a. Pengguna internal, yaitu manajer yang merencanakan, mengatur, dan menjalankan bisnis, termasuk manajer pemasaran, supervi produksi, direktur keuangan, dan karyawan perusahaan.
- b. Pengguna eksternal, yaitu individual dan organisasi di luar perusahaan yang menginginkan informasi keuangan perusahaan. Investor (pemilik) menggunakan informasi akuntansi untuk membuat keputusan untuk membeli, menahan, atau menjual kepemilikan saham perusahaan. Kreditur (seperti pemasok dan bank) menggunakan informasi akuntansi untuk mengevaluasi risiko menyetujui kredit atau meminjamkan uang.

2.1.3 Audit

Menurut Arens *et al*, (2017) “*Auditing* adalah proses akumulasi dan evaluasi bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan”. *Auditing* harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. Berdasarkan Standar Audit (SA) 200 (Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), 2016) tujuan suatu audit adalah untuk meningkatkan tingkat keyakinan pengguna laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Menurut Arens *et al*. (2017) terdapat 3 jenis audit:

1. Audit operasional (*Operational audit*)
Melakukan evaluasi terhadap efisiensi dan efektifitas pada prosedur dan metode yang digunakan dalam operasi perusahaan.
2. Audit kepatuhan (*Compliance audit*)
Menentukan apakah *auditee* mengikuti prosedur, peraturan yang telah ditentukan oleh pihak yang memiliki otoritas lebih tinggi.

3. Audit laporan keuangan (*Financial statement audit*)

Menentukan apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan kriteria.

Standar audit mengharuskan auditor untuk memperoleh pemahaman dari masing-masing lima komponen pengendalian internal untuk merencanakan audit. Pemahaman ini mencakup pengetahuan tentang rancangan pengendalian yang relevan dan apakah pengendalian telah ditempatkan dalam operasi oleh entitas. Menurut Arens *et al* (2017) lima komponen pengendalian internal sebagaimana didefinisikan oleh kerangka kerja *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)*, yaitu:

a. Lingkungan pengendalian (*control environment*)

Terdiri dari tindakan, kebijakan, dan prosedur yang secara keseluruhan mencakup sikap manajemen puncak, dewan direksi, dan pemilik entitas mengenai pengendalian internal dan kepentingan entitas tersebut.

b. Penilaian risiko (*risk assessment*)

Penilaian risiko adalah proses untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang dapat mencegah pencapaian tujuan entitas.

c. Aktivitas pengendalian (*control activities*)

Kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil untuk pencapaian tujuan entitas.

d. Informasi dan komunikasi (*information and communication*)

Tujuan dari informasi akuntansi dan sistem komunikasi entitas adalah untuk memulai, mencatat, memproses, dan melaporkan transaksi entitas, serta menjaga akuntabilitas atas aset.

e. Pemantauan (*monitoring*)

Pemantauan berkaitan dengan penilaian berkelanjutan atau berkala dari kualitas pengendalian internal oleh manajemen untuk menentukan bahwa pengendalian berjalan sebagaimana dimaksud dan merancang ulang apabila terdapat perubahan kondisi.

Untuk memperoleh bukti audit yang tepat dalam mendukung semua asersi manajemen di laporan keuangan, auditor harus mengikuti proses audit yang

merupakan metodologi dalam mengatur audit untuk memastikan bahwa bukti yang dikumpulkan cukup dan sesuai serta tujuan audit terpenuhi. Menurut Arens *et al*, (2017) proses audit mempunyai empat tahapan utama yaitu:

1. Merencanakan dan merancang pendekatan audit

Dalam tahapan ini terdapat tiga aspek kunci, yaitu memperoleh pemahaman mengenai entitas dan lingkungannya, memahami pengendalian internal dan menilai risiko pengendalian, dan menilai risiko salah saji.

Program audit adalah daftar prosedur audit untuk area audit atau keseluruhan audit. Prosedur audit merupakan instruksi terperinci yang menjelaskan bukti audit yang akan diperoleh selama audit. Terdapat delapan tipe bukti audit, yaitu:

a. Pemeriksaan fisik (*physical examination*)

Inspeksi atau perhitungan yang dilakukan oleh auditor atas aset berwujud (*tangible asset*). Jenis bukti ini sering berkaitan dengan persediaan dan kas, tetapi dapat pula diterapkan untuk berbagai verifikasi atas sekuritas, wesel tagih, serta aset tetap berwujud.

b. Konfirmasi (*confirmation*)

Menggambarkan penerimaan tanggapan baik secara tertulis langsung dari pihak ketiga yang memverifikasikan keakuratan informasi sebagaimana yang diminta oleh auditor. Permintaan ini ditujukan bagi klien, dan klien meminta pihak ketiga untuk memberikan tanggapannya secara langsung kepada auditor.

c. Inspeksi (*inspection*)

Pemeriksaan auditor atas dokumen dan catatan klien untuk memperkuat informasi yang atau harus, termasuk dalam laporan keuangan.

d. Prosedur analitis (*analytical procedures*)

Didefinisikan oleh standar audit sebagai evaluasi informasi keuangan melalui analisis hubungan yang masuk akal antara data keuangan dan *non*-keuangan. Tujuan prosedur analitis yaitu digunakan untuk memahami industri dan bisnis klien, menilai kemampuan keberlanjutan

- entitas, menunjukkan adanya kemungkinan salah saji dalam laporan keuangan, dan memberikan bukti yang mendukung saldo akun.
- e. Wawancara dengan klien (*inquiries of the client*)
Memperoleh informasi secara tertulis maupun lisan dari klien dalam menanggapi pertanyaan dari auditor.
 - f. Penghitungan ulang (*recalculation*)
Melibatkan pengecekan kembali sampel perhitungan yang dilakukan oleh klien.
 - g. Pelaksanaan ulang (*reperformance*)
Pengujian independen auditor atas prosedur atau pengendalian akuntansi klien yang pada awalnya dilakukan sebagai bagian dari sistem akuntansi dan pengendalian internal entitas.
 - h. Observasi (*observation*)
Melihat suatu proses atau prosedur yang dilakukan oleh pihak lain.
2. Melaksanakan pengujian pengendalian (*tests of control*) dan pengujian substantif atas transaksi (*substantive tests of transaction*). Sebelum auditor memutuskan untuk mengurangi penilaian auditor atas risiko pengendalian yang direncanakan apabila pengendalian internal dianggap efektif, auditor harus menguji keefektifan pengendalian tersebut. Prosedur pengujian tersebut disebut dengan pengujian pengendalian (*tests of control*). Auditor juga harus mengevaluasi pencatatan transaksi klien dengan memverifikasi jumlah moneter transaksi tersebut, proses tersebut disebut dengan pengujian substantif atas transaksi (*substantive tests of transaction*).
 3. Melakukan prosedur analitis substantif (*substantive analytical procedures*) dan pengujian rincian saldo (*tests of detail of balances*). Terdapat dua kategori umum dalam prosedur ini. Prosedur analitis terdiri dari evaluasi informasi keuangan melalui hubungan yang masuk akal antara data keuangan dan non keuangan. Ketika prosedur analitis digunakan sebagai bukti untuk memberikan jaminan tentang saldo akun maka disebut prosedur analitis substantif (*substantive analytical procedures*). Pengujian rincian saldo (*tests of detail of balances*) merupakan prosedur spesifik yang

ditujukan untuk menguji salah saji moneter pada saldo-saldo dalam laporan keuangan. Pengujian atas rincian saldo akhir merupakan hal yang penting karena sebagian besar bukti diperoleh dari pihak ketiga dan dianggap berkualitas tinggi.

4. Melengkapi proses audit dan menerbitkan laporan audit. Setelah auditor menyelesaikan semua prosedur untuk setiap tujuan audit dan akun laporan keuangan serta pengungkapan yang terkait, maka diperlukan waktu untuk menggabungkan semua informasi yang diperoleh untuk membuat kesimpulan apakah laporan keuangan disajikan secara wajar. Laporan audit merupakan tahap terakhir dalam seluruh proses audit. Opini audit adalah pernyataan standar dari kesimpulan auditor yang didapatkan berdasarkan kesimpulan dari proses audit.

2.1.4 Audit delay

Audit delay adalah periode waktu antara tanggal tahun tutup buku perusahaan yaitu 31 Desember sampai tanggal penandatanganan laporan audit independen yang mengindikasikan tentang lamanya waktu penyelesaian audit yang dilakukan auditor. “*Audit delay* merupakan rentang waktu untuk menyelesaikan suatu laporan audit atas laporan keuangan, yang diukur dari penutupan tahun buku sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan audit” (Diana, 2017).

Audit delay adalah senjang waktu audit, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh auditor untuk menghasilkan laporan audit atas kinerja laporan keuangan suatu perusahaan. Senjang waktu ini dihitung dari selisih tanggal laporan keuangan tahunan perusahaan sampai dengan tanggal laporan audit yang dikeluarkan oleh KAP (Sukmasari, 2019). Menurut Ocatifilia dan Utari (2019) *audit delay* adalah faktor yang menyebabkan lamanya laporan audit keuangan dikeluarkan. Perbedaan waktu antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal opini audit dalam laporan keuangan mengindikasikan tentang lamanya waktu penyelesaian audit yang dilakukan oleh auditor. “Perbedaan waktu ini dalam audit sering dinamai dengan *audit delay*” (Karyadi, 2017). Menurut Kurniawati *et al.* (2016) terdapat 3 komponen *audit delay*, yaitu:

1. *Scheduling lag* adalah selisih waktu antara akhir tahun fiskal perusahaan dengan dimulainya pekerjaan auditor.
2. *Fieldwork lag* adalah selisih waktu antara dimulainya pekerjaan lapangan dan saat penyelesaiannya.
3. *Reporting lag* adalah selisih waktu antara penyelesaian pekerjaan lapangan dan tanggal laporan auditor.

Audit delay diukur secara kuantitatif dalam jumlah hari. *Audit delay* dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut (Sukmasari, 2019):

$$\text{Audit Delay} = \text{Tanggal Laporan Auditor} - \text{Tanggal Tutup Buku}$$

Gambar 2.1 Rumus *Audit delay*

Keterangan:

Audit Delay : Lamanya waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku yaitu 31 Desember hingga diterbitkannya laporan auditor independen.

Tanggal Laporan Auditor : Tanggal diterbitkannya laporan auditor.

Tanggal Tutup Buku : Tanggal penutupan tahun buku yaitu 31 Desember.

Menurut Arens *et al.* (2017) terdapat delapan bagian standar laporan audit yang terdiri dari:

1. Judul laporan (*report title*)
Standar audit menyatakan laporan harus diberikan judul yang mengandung kata *independent*. Kewajiban pencantuman kata ini untuk memberitahu para pemakai laporan bahwa audit yang dilakukan tidak menyimpang.
2. Alamat laporan audit (*audit report address*)
Laporan biasanya ditujukan untuk perusahaan, pemegang saham, atau dewan direksi perusahaan.

3. Paragraf pendahuluan (*introductory paragraph*)
Paragraf pertama yang menunjukkan kantor akuntan publik telah melakukan audit.
4. Tanggung jawab manajemen (*management responsibility*)
Paragraph menyatakan bahwa laporan ini merupakan tanggung jawab manajemen. Tanggung jawab ini meliputi prinsip-prinsip akuntansi yang tepat dan penyelenggaraan pengendalian internal atas pelaporan keuangan.
5. Tanggung jawab auditor (*auditor responsibility*)
Paragraph pertama menyatakan bahwa audit telah dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku umum. Paragraf kedua menunjukkan bahwa prosedur yang digunakan tergantung pada pertimbangan auditor dan mencakup penilaian risiko salah saji material dalam laporan keuangan. Paragraf ketiga menunjukkan auditor yakin bahwa bukti audit yang tepat dan mencukupi telah diperoleh demi mendukung pendapat auditor.
6. Paragraf opini (*opinion paragraph*), paragraf terakhir dalam laporan audit menyatakan kesimpulan auditor berdasarkan hasil audit.
7. Nama dan alamat kantor akuntan publik (*name and address of CPA firm*), nama mengidentifikasi Kantor Akuntan Publik (KAP) yang melaksanakan audit. Kota dan negara bagian lokasi KAP juga harus dicantumkan.
8. Tanggal laporan audit (*audit report date*), tanggal yang tepat untuk dicantumkan pada laporan audit adalah ketika auditor menyelesaikan prosedur audit di lokasi pemeriksaan. Tanggal ini penting karena menunjukkan hari terakhir dari tanggung jawab auditor untuk mereview peristiwa yang penting setelah tanggal laporan keuangan.

Menurut Ningsih dan Widhiyani (2015) “perusahaan dapat dikatakan terlambat dalam penyajian laporan keuangan apabila *audit delay* melebihi jangka waktu dari ketentuan yang sudah diberlakukan”. Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor X.K.2 Mewajibkan perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia menyampaikan laporan keuangan perusahaan yang sudah diaudit oleh akuntan publik. Peraturan OJK mengenai penyampaian laporan keuangan nomor: KEP-346/BL/2011 menyatakan bahwa Laporan

keuangan tahunan wajib disertai laporan auditan dan disampaikan kepada OJK serta dipublikasikan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan ke tiga atau setelah 90 hari setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Bursa Efek Indonesia (BEI) mengeluarkan peraturan nomor: KEP-307/BEJ/07/2004 mengenai sanksi yang diberikan bagi perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan, yaitu:

1. Keterlambatan 1-30 hari akan diberikan peringatan tertulis I
2. Keterlambatan 31-60 hari akan diberikan peringatan tertulis II dan denda sebesar Rp50.000.000,00
3. Keterlambatan 61-90 hari akan diberikan peringatan tertulis III dan denda sebesar Rp150.000.000,00
4. Keterlambatan > 90 hari akan diberikan suspensi

Berdasarkan hasil penelitian Adiraya & Sayidah (2018) terhadap perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2015 menunjukkan rata-rata *audit delay* sebesar 74,04 hari. Menurut penelitian Gozali & Harjanto (2020) terhadap perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2018 menunjukkan rata-rata *audit delay* 72,15 hari. Sedangkan menurut penelitian Suparsada dan Putri (2017) terhadap perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012-2014 menunjukkan rata-rata *audit delay* sebesar 76,91.

Agustin *et al.* (2018) menyatakan bahwa “*audit delay* yang melewati batas waktu ketentuan akan berakibat pada keterlambatan publikasi laporan keuangan. Keterlambatan publikasi laporan keuangan bisa mengindikasikan adanya masalah dalam laporan keuangan, sehingga memerlukan waktu yang lebih lama dalam penyelesaian *audit*”. Menurut Amani (2016) “pemeriksaan laporan keuangan oleh auditor independen untuk menilai kewajaran penyajian laporan keuangan yang membutuhkan waktu yang cukup lama, karena banyaknya transaksi yang harus diaudit, kerumitan dari transaksi, dan pengendalian internal yang kurang baik menyebabkan *audit delay* semakin meningkat”.

2.1.5 Ukuran Perusahaan

Menurut Okalesa (2018) ukuran perusahaan adalah besar kecilnya perusahaan yang diukur dari besarnya total aset atau kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan. “Total aset yang digambarkan dalam ukuran perusahaan akan menunjukkan seberapa besar perusahaan itu. Semakin besar aset yang dimiliki oleh perusahaan, semakin besar ukuran perusahaan”. (Syachrudin dan Nurlis, 2018).

Menurut Octafilia dan Utari (2019), ukuran perusahaan mempengaruhi kompleksitas perusahaan. Ukuran perusahaan yang besar cenderung akan memiliki cabang dan anak perusahaan sehingga waktu penyusunan laporan keuangannya akan semakin lama. Semakin besar ukuran suatu perusahaan maka waktu yang dibutuhkan untuk mengaudit laporan keuangan akan semakin lama, karena perusahaan yang besar memiliki akun-akun yang bervariasi disertai saldo akun dengan jumlah yang lebih besar dibanding perusahaan dengan ukuran yang lebih kecil, sehingga dibutuhkan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan proses audit yang menyebabkan risiko perusahaan mengalami keterlambatan publikasi laporan keuangan lebih besar (Clarisa dan Pangerapan, 2019).

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 53/POJK 04/2017 ukuran perusahaan dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Emiten skala kecil
Badan hukum yang memiliki total aset tidak lebih dari Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah).
2. Emiten skala menengah
Badan hukum yang memiliki total aset lebih dari Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) sampai dengan Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah).
3. Emiten skala besar
Badan hukum yang memiliki total aset lebih dari Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah).

Dalam Penelitian ini, ukuran perusahaan diproksikan dengan logaritma natural total asset. Rumus untuk menghitung ukuran perusahaan (Suparsada dan Putri, 2017):

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \ln(\text{Total Assets})$$

Gambar 2.2 Rumus Ukuran Perusahaan

Keterangan:

$\ln(\text{Total Assets})$: Logaritma natural total asset.

Berdasarkan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (IAI, 2018), Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomik masa depan diharapkan akan mengalir ke entitas. Aset diakui dalam laporan posisi keuangan jika kemungkinan besar bawa manfaat ekonomik masa depan akan mengalir ke entitas dan aset tersebut mempunyai biaya atau nilai yang dapat diukur dengan andal (IAI, 2018).

Menurut Weygandt (2019), Total aset terdiri dari *current assets*, *long term investment*, *property, plant, and equipment*, dan *intangible assets*. *Current assets* adalah aset yang perusahaan harapkan dapat dikonversi menjadi uang tunai atau digunakan dalam waktu satu tahun, seperti *prepaid expenses*, *inventories*, *receivables*, *short-term investment*, dan *cash*. Menurut Kieso et al (2018), *Current assets* merupakan kas dan aset lain perusahaan yang diharapkan dapat dikonversi menjadi uang tunai, dijual, atau digunakan dalam satu tahun atau dalam siklus operasi perusahaan, seperti *cash*, *short-term investment*, *prepaid expenses*, *receivables*, dan *inventories*.

1. *Cash* merupakan aset yang paling likuid, berupa koin, cek serta rekening bank milik perusahaan.
2. *Short-term investment*, perusahaan harus melaporkan sekuritas perdagangan (utang atau ekuitas) sebagai aset lancar, dan semua perdagangan efek dilaporkan pada nilai wajar.

3. *Prepaid expenses* adalah biaya yang sudah dibayar tunai dan dicatat sebagai aset sebelum digunakan atau dikonsumsi.
4. *Receivables* adalah klaim yang dimiliki perusahaan terhadap pelanggan untuk barang atau jasa yang telah diberikan perusahaan.
5. *Inventory* adalah aset yang dimiliki perusahaan untuk dijual dalam kegiatan bisnis, atau barang yang akan digunakan atau dikonsumsi dalam produksi barang yang akan dijual.

Menurut Kieso *et al* (2018), Aset tidak lancar (*non-current assets*) merupakan aset yang tidak memenuhi definisi dari aset lancar (*current assets*), seperti *others assets, intangible assets, property, plant dan equipment, dan long-term investments*.

1. *Other assets* memiliki banyak macam seperti biaya dibayar dimuka jangka panjang (*long-term prepaid expense*) dan piutang tidak lancar (*non-current receivables*). Item lain yang termasuk seperti aset dana khusus, properti yang dimiliki untuk dijual, dan kas atau surat berharga yang terbatas (*restricted cash or securities*).
2. *Intangible assets* adalah aset yang tidak memiliki wujud fisik dan bukan instrumen keuangan, termasuk paten, hak cipta, *franchises, goodwill, trademarks, trade names, dan customer list*.
3. *Property, plant dan equipment* adalah aset berwujud yang memiliki jangka waktu panjang yang digunakan dalam operasi bisnis, termasuk *physical property* seperti tanah, bangunan, mesin, *furniture, alat, dan wasting resources*.
4. *Long-term investments* sering disebut investasi yang normalnya memiliki satu kondisi dari empat tipe sebagai berikut:
 - a. Investasi pada saham seperti obligasi, saham biasa atau wesel jangka panjang.
 - b. Investasi pada aset berwujud yang saat ini tidak digunakan dalam operasi, seperti tanah untuk spekulasi.

- c. Investasi yang disisihkan untuk dana khusus, seperti dana cadangan, dana pensiun, atau dana ekspansi pabrik.
- d. Investasi pada anak perusahaan yang tidak dikonsolidasi atau perusahaan asosiasi.

2.1.6 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Audit delay*

Pada dasarnya ukuran perusahaan adalah gambaran besar kecilnya skala operasi suatu perusahaan (Rukmana *et al*, 2017). Ukuran perusahaan tersebut akan mencerminkan seberapa besar dan luasnya proses audit yang akan dijalankan oleh auditor. Hal ini dikarenakan perusahaan yang besar cenderung memiliki jumlah transaksi yang besar pula. Hal tersebut akan memperpanjang proses audit yang dilakukan oleh auditor (Cristansy dan Ardiati, 2018).

Menurut Octafilia dan Utari (2019), Perusahaan yang besar akan memiliki aset yang besar dan cenderung memiliki lebih banyak cabang dan anak perusahaan sehingga auditor dalam melakukan prosedur audit mengenai aset perusahaan akan membutuhkan waktu yang lebih lama dan menyebabkan *audit delay* menjadi panjang. Sebaliknya, perusahaan yang berukuran kecil akan memiliki aset yang lebih sedikit dan cenderung tidak memiliki banyak cabang dan anak perusahaan, sehingga akan membutuhkan waktu yang lebih sedikit dalam proses auditnya. Oleh sebab itu, *audit delay* menjadi pendek.

Berdasarkan penelitian Ratnasari dan Yennisa (2017), Arifanto dan Riduwan (2017), Rahmawati dan Suryono (2016), ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *audit delay*. Menurut Utami (2018), ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *audit delay*. Menurut Alfiani dan Nurmala (2020), ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Sedangkan berdasarkan hasil penelitian Suginam (2016), dan Okalesa (2018) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Berdasarkan landasan teori yang telah dijelaskan, maka diajukan hipotesis alternatif terkait pengaruh ukuran perusahaan terhadap *audit delay* sebagai berikut:

Ha1 : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *audit delay*.

2.1.7 Profitabilitas

Menurut Kieso et al., (2019) rasio profitabilitas adalah rasio yang mengukur pendapatan atau keberhasilan operasi dari sebuah perusahaan untuk periode tertentu. “Profitabilitas adalah kemampuan perseroan untuk menghasilkan suatu keuntungan yang menyokong pertumbuhan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang” (Suparsada dan Putri, 2017). Rasio profitabilitas terdiri dari (Kieso et al., 2019):

1. *Profit Margin*

Mengukur berapa persentase laba bersih yang diperoleh untuk setiap Rupiah penjualan yang dihasilkan. Rasio ini dihitung dengan cara membagi laba bersih dengan penjualan bersih.

2. *Asset Turnover*

Mengukur seberapa efisien suatu perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Rasio ini dihitung dengan cara membagi penjualan bersih dengan rata-rata aset.

3. *Return on Asset*

Mengukur profitabilitas secara keseluruhan. Rasio ini dihitung dengan cara membagi laba bersih dengan rata-rata aset.

4. *Return on Ordinary Shareholder's Equity*

Rasio ini menunjukkan seberapa banyak Rupiah dari laba bersih yang diperoleh perusahaan untuk setiap Rupiah yang diinvestasikan oleh pemegang saham. Rasio ini dihitung dengan cara membagi laba bersih dengan rata-rata modal pemegang saham biasa.

5. *Earning per Share*

Mengukur laba bersih yang diperoleh dari setiap lembar saham biasa. Rasio ini dihitung dengan cara membagi laba bersih dengan rata-rata tertimbang jumlah lembar saham yang biasa beredar.

6. *Price Earning Ratio*

Mengukur rasio harga pasar masing-masing saham untuk laba per saham. Digunakan oleh investor untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dimasa yang akan datang. Rasio ini dihitung dengan cara membagi harga pasar per lembar saham dengan laba per saham.

7. *Payout Ratio*

Mengukur persentase pendapatan yang terdistribusi dalam bentuk dividen tunai. Rasio ini dihitung dengan cara membagi dividen tunai dengan laba bersih.

Rasio profitabilitas dalam penelitian ini menggunakan proksi *Return on Asset* (ROA) (Adiraya dan Sayidah, 2018). Rumus *Return on Asset* dan *Average Total Asset* (Kieso *et al*, 2019):

$$ROA = \frac{Net\ Income}{Average\ Assets}$$

$$Average\ Asset = \frac{Total\ aset\ periode\ awal + Total\ aset\ periode\ akhir}{2}$$

Gambar 2.3 Rumus ROA dan *Average Assets*

Keterangan:

Return on Asset (ROA) : Laba yang diperoleh dari rata-rata aset.

Net Income : Laba bersih setelah pajak yang diperoleh perusahaan pada periode waktu tertentu.

Average Asset : Rata-rata total aset periode awal ditambah total aset periode akhir kemudian dibagi dua.

Menurut Kieso *et al* (2018), *net income* merupakan hasil bersih dari kinerja perusahaan selama periode waktu tertentu. *Net income* merupakan laba setelah semua pendapatan dan beban untuk suatu periode yang dipertimbangkan. Hal ini dipandang penting oleh banyak orang sebagai ukuran keberhasilan atau kegagalan suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan PSAK

No. 1 (IAI, 2018), laba tahun berjalan (*net income*) disajikan dalam laporan laba rugi. Laba tahun berjalan diperoleh dari pendapatan dikurangi dengan beban pokok penjualan sehingga menghasilkan laba bruto. Laba bruto ditambah dengan penghasilan lain serta dikurangi dengan biaya distribusi, beban administrasi, beban lain-lain, biaya pendanaan, dan bagian laba entitas asosiasi sehingga menghasilkan laba sebelum pajak. Laba sebelum pajak dikurangi dengan beban pajak penghasilan sehingga menghasilkan laba tahun berjalan.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2018) dalam PSAK 1 aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomik masa depan diharapkan dapat mengalir ke entitas. Sugiono dan Untung (2016) menyatakan bahwa ROA tinggi berarti perusahaan mampu mendayagunakan aset dengan baik untuk memperoleh keuntungan. Menurut Maiyaliza *et al.* (2019) Nilai ROA dibawah rata-rata bukan merupakan hal yang baik, tetapi tingkat pengembalian atas aset yang rendah tidak berarti buruk, itu diakibatkan oleh keputusan yang disengaja untuk menggunakan utang dalam jumlah besar, beban bunga yang tinggi menyebabkan laba bersih relatif lebih rendah.

2.1.8 Pengaruh Profitabilitas terhadap *Audit delay*

Zebrianti dan Subardjo (2016) menyatakan bahwa profitabilitas penting dalam usaha mempertahankan kelangsungan perusahaan karena profitabilitas menunjukkan apakah perusahaan tersebut mempunyai prospek yang baik atau tidak. Menurut Apriyana dan Rahmawati (2017), perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi membutuhkan waktu yang lebih cepat dalam pengauditan laporan keuangan.

Keberhasilan yang ada pada suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dapat diukur dengan rasio profitabilitas (Nadia dan Metalia, 2020). “Nilai profitabilitas yang tinggi mengindikasikan kinerja manajemen yang baik karena hal tersebut mempengaruhi cepat atau lambatnya manajemen melaporkan kinerjanya” (Kuncaratrah *et al.*, 2019). ROA dapat menjelaskan sampai sejauh mana keefektifan dan seluruh manajemen dalam menciptakan

keuntungan bagi perusahaan. ROA menunjukkan berapa besar laba bersih diperoleh perusahaan bila diukur dari nilai aktiva. “ROA dapat digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan modal, penggunaan produk dan efisiensi penjualan” (Prameswari dan Yustrianthe, 2015). Menurut Febrianti dan Sudarno (2020), perusahaan yang mendapat laba tinggi dapat mencerminkan kinerja perusahaan yang baik terhadap pihak lain. Menurut Kasmir (2012) dalam Firliana dan Sulasmiyati (2017), ROA dapat menggambarkan tingkat efektivitas manajemen dalam suatu perusahaan.

Menurut Utami *et al* (2018), jika profitabilitas rendah auditor akan meningkatkan kehati-hatiannya dalam melakukan proses audit, dengan melakukan analisis lebih dalam untuk memastikan tidak adanya masalah keuangan dan kecurangan manajemen. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yaitu penelitian Juanta dan Ratih (2021), Fanny, Septiyanti, Sukmasari (2019), Rubianto (2017), Suparsada dan Putri (2017) menyimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Penelitian Okalesa (2018) menyimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *audit delay*. Sedangkan penelitian Suginam (2016), dan Zebriyanti dan Subardjo (2016) menyimpulkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Berdasarkan landasan teori yang telah dijelaskan, maka diajukan hipotesis alternatif terkait pengaruh profitabilitas terhadap *audit delay* sebagai berikut:

Ha2 : Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *audit delay*.

2.1.9 Solvabilitas

Menurut Kieso *et al* (2019) rasio solvabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk bertahan dalam periode jangka panjang. Rasio solvabilitas terdiri dari (Kieso *et al.*, 2019):

a. *Debt to Assets Ratio*

Debt to assets ratio mengukur persentase total aset yang berasal dari kreditur. Rasio tersebut juga mengindikasikan kemampuan keberlangsungan

perusahaan dalam membayar bunga kepada kreditur walaupun sedang mengalami kerugian.

b. *Times Interest Earned*

Time interest earned memberikan indikasi atas kemampuan perusahaan membayar bunga saat jatuh tempo.

Dalam penelitian ini pengukuran untuk solvabilitas menggunakan *Debt to Assets Ratio (DAR)*. Rumus *Debt to Assets Ratio (DAR)* (Gozali dan Harjanto, 2020):

$$DAR = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Asset}}$$

Gambar 2.4 Rumus DAR

Keterangan:

Debt to Assets Ratio : Rata-rata utang yang dimiliki perusahaan untuk mendapatkan aset perusahaan.

Total Debt : Total utang yang dimiliki oleh perusahaan.

Total Asset : Total aset yang dimiliki oleh perusahaan.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2018) dalam PSAK 1 liabilitas adalah kewajiban kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus kas keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Menurut Kieso *et al.* (2019) terdapat dua jenis liabilitas, yaitu:

1. Kewajiban lancar (*current liabilities*) adalah kewajiban lancar yang memiliki karakteristik, yaitu:

a. Perusahaan memperkirakan untuk membayar utang dari aset yang dimiliki atau timbulnya kewajiban lancar lainnya.

b. Perusahaan membayar utang dalam periode satu tahun atau siklus operasional.

Kewajiban lancar meliputi utang usaha, pendapatan dibayar dimuka, utang pajak, utang gaji, utang bunga.

2. Kewajiban tidak lancar (*non-current liabilities*) adalah pengeluaran sumber daya sebagai akibat dari kewajiban saat ini yang tidak akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau siklus operasi mana yang lebih pendek. Kewajiban tidak lancar meliputi utang obligasi, utang wesel, dan utang *mortgage*.

Menurut Zulkarnaen (2018) semakin tinggi rasio *debt to total asset* (DAR) berarti semakin besar jumlah modal pinjaman yang digunakan untuk investasi pada aktiva guna menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Menurut Siregar (2017) penggunaan utang yang terlalu tinggi akan membahayakan perusahaan karena perusahaan akan masuk kategori *extremely average* (utang ekstrim) yaitu perusahaan terjebak dalam tingkat utang yang tinggi dan sulit melepaskan beban utang tersebut. Menurut Hendri (2015) semakin rendah *debt to total asset* maka akan meningkatkan laba sehingga semakin besar jaminan kreditor untuk pengembalian atas pinjaman yang diberikan oleh pihak perusahaan.

2.1.10 Pengaruh Solvabilitas terhadap *Audit delay*

Menurut Okalesa (2018) solvabilitas yang tinggi menggambarkan keadaan perusahaan yang kurang baik dan meningkatkan fokus auditor bahwa laporan keuangan kurang *reliable*. Fokus auditor akan membutuhkan waktu yang lebih lama dalam melaksanakan proses audit karena harus mengumpulkan alat bukti yang lebih kompeten untuk meyakinkan kewajaran laporan keuangan. “Tingginya solvabilitas mencerminkan tingginya risiko keuangan perusahaan” (Adiraya dan Sayidah, 2018). Tingginya risiko mencerminkan perusahaan mengalami kesulitan keuangan dan akan mempengaruhi kondisi perusahaan di mata masyarakat oleh sebab itu pihak manajemen cenderung menunda penyampaian laporan keuangan. Menurut Efendi (2018) rasio utang yang tinggi terhadap total aset dapat berdampak pada kurangnya kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan kewajibannya. Tingginya solvabilitas mengakibatkan auditor memerlukan waktu yang lebih banyak dalam menyelesaikan pekerjaan audit sehingga menyebabkan *audit delay* menjadi panjang.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, yaitu penelitian Sambo dan Wahyuningsih (2016), Soedarsa dan Nurdiawansyah (2017) solvabilitas memiliki pengaruh negatif terhadap *audit delay*. Sedangkan penelitian Rubianto (2017) dan Okalesa (2018) menyatakan bahwa solvabilitas berpengaruh positif terhadap *audit delay*. Penelitian Suginam (2016), Arumsari dan Handayani (2017), Karyadi (2017), dan Fanny, Septiyanti dan Sukmasari (2019) menyatakan bahwa solvabilitas tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Berdasarkan landasan teori yang telah dijelaskan, maka diajukan hipotesis alternatif terkait pengaruh solvabilitas terhadap *audit delay* sebagai berikut:

Ha3 : Solvabilitas berpengaruh positif terhadap *audit delay*.

2.1.11 Kepemilikan Institusional

Menurut Suparsada dan Putri (2017) kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain. Kepemilikan saham oleh pihak luar atau pihak institusi mempunyai kekuatan untuk menuntut dan mewajibkan pihak manajemen agar menyampaikan informasi keuangan dengan segera karena laporan keuangan yang diserahkan terlambat akan berpengaruh terhadap keputusan ekonomi yang akan diambil oleh para pemakai informasi. (Suparsada dan Putri, 2017).

Menurut Kieso *et al.* (2019) terdapat tiga jenis saham, yaitu:

1. *Ordinary Shares*

Hak-hak yang dimiliki pemegang *ordinary shares*, yaitu:

- a. Memiliki hal *voting* dalam memilih *Board of Directors* dalam pertemuan tahunan dan *voting* dalam setiap kegiatan yang membutuhkan keputusan pemegang saham.
- b. Mendapat pembagian laba perusahaan melalui dividen.
- c. Memiliki hak untuk tetap mendapatkan persentase kepemilikan yang sama saat penerbitan saham baru.

- d. Mendapatkan pembagian aset bila terjadi likuidasi sesuai dengan proporsi yang dipegang oleh pemilik saham. Pemilik saham dibayar dengan aset setelah semua klaim dari kreditor telah dibayarkan.

2. *Preference Shares*

Pemegang *preference shares* mempunyai prioritas atas distribusi dividen dan aset pada saat likuidasi tetapi pada umumnya tidak memiliki hak *voting*.

3. *Treasury Shares*

Treasury shares adalah saham milik perusahaan yang beredar dan dibeli kembali dari pemegang saham. Alasan perusahaan membeli kembali saham:

- a. Untuk diberikan kepada karyawan sebagai bonus atau kompensasi dalam bentuk saham.
- b. Memberikan sinyal kepada pasar bahwa harga saham tersebut sedang *underpriced*.
- c. Untuk memperoleh tambahan saham yang digunakan untuk akuisisi perusahaan lain.
- d. Untuk mengurangi jumlah saham yang beredar sehingga dapat meningkatkan nilai *earning per share*.

Menurut Kieso *et al.* (2019) *outstanding shares* adalah jumlah saham beredar yang dipertahankan oleh pemegang saham. Menurut Kieso *et al.* (2019) pertimbangan yang dilakukan saat penerbitan saham, yaitu:

1. *Authorized shares*, menunjukkan jumlah saham yang diijinkan untuk dijual
2. *Issuance of shares*, faktor-faktor dalam menentukan harga pada penerbitan saham baru, yaitu:
 - a. Perusahaan mengantisipasi laba masa depan.
 - b. Tingkat dividen per saham yang diharapkan.
 - c. Posisi keuangan pada saat ini.
 - d. Keadaan ekonomi pada saat ini.
 - e. Kondisi pasar sekuritas pada saat ini.
3. *Market price of shares*, secara umum harga per saham ditetapkan mengikuti tren pendapatan dan dividen perusahaan.

4. *Par and non-par value shares*

- a. *Par value shares* adalah saham biasa yang mana *charter* telah menetapkan nilai per saham.
- b. *Non-par value shares* adalah saham biasa yang mana belum memberikan nilai.

Pengukuran kepemilikan institusional pada penelitian ini menggunakan rumus (Suparsada dan Putri, 2017):

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Saham yang dimiliki institusi}}{\text{Total Saham perusahaan yang beredar}} \times 100\%$$

Gambar 2.5 Rumus Kepemilikan Institusional

Keterangan:

Kepemilikan Institusional : Saham yang dimiliki oleh institusi.

Saham yang dimiliki institusi : Jumlah lembar saham yang dimiliki oleh institusi.

Total saham yang beredar : Jumlah lembar saham yang dijual kepada publik.

2.1.12 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Audit delay*

Agatha (2015) menyatakan bahwa kepemilikan perusahaan oleh pihak luar atau pihak institusi mempunyai kekuatan yang besar untuk menekan manajemen agar dapat menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu karena pihak luar mampu mempengaruhi perusahaan agar dengan cepat mampu menyelesaikan proses auditnya karena kepentingan dari beberapa institusi terkait. Menurut Lestari (2017) semakin besar kepemilikan oleh institusional maka semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan dan diharapkan juga dapat bertindak sebagai pencegahan terhadap pemborosan yang dilakukan oleh manajemen. Kepemilikan institusional memiliki kelebihan antara lain: (Lestari, 2017)

1. Memiliki profesionalisme dalam menganalisis informasi sehingga dapat menguji keandalan informasi.

2. Memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan lebih ketat atas aktivitas yang terjadi dalam perusahaan.

Menurut Diajeng (2016) investor institusional memiliki potensi untuk mempengaruhi kegiatan manajemen secara langsung melalui kepemilikan saham di perusahaan tersebut. Pihak institusi dapat menuntut penyelesaian audit dengan segera karena keterlambatan penyampaian laporan keuangan akan berpengaruh terhadap keputusan yang akan diambil oleh pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan. Menurut Harnida (2015) *Monitoring* yang dilakukan oleh pihak institusi lebih efektif dibandingkan oleh pihak individu karena institusi memiliki sumber daya dan kemampuan yang lebih besar sehingga mampu melakukan *monitoring* yang lebih kuat. Dengan adanya kepemilikan institusional perusahaan akan semakin terdorong untuk mengungkapkan informasi lebih cepat untuk menghindari berkurangnya relevansi dari informasi tersebut. Laporan keuangan yang diserahkan terlambat akan berpengaruh terhadap keputusan ekonomi yang akan diambil oleh para pemakai informasi tersebut.

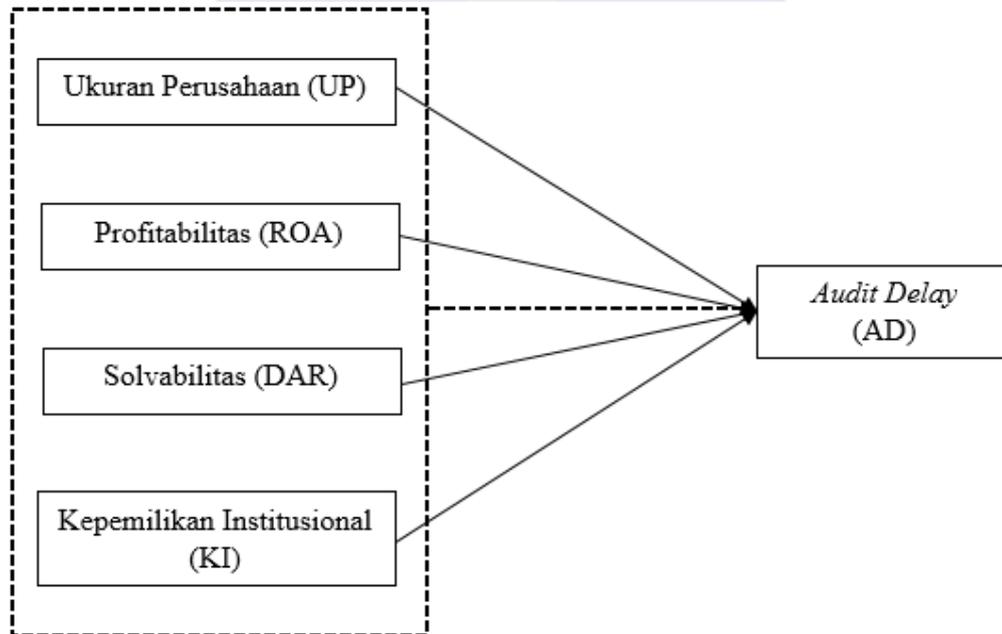
Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, yaitu penelitian Agatha (2015), Suparsada dan Putri (2017), Gozali dan Harjanto (2020) kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Penelitian Diajeng (2016) menyimpulkan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Penelitian Jao dan Crismayani (2018) menyimpulkan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Sedangkan penelitian Utomo dan Sawitri (2021) menyimpulkan kepemilikan institusional tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap *audit delay*.

Berdasarkan kerangka teori yang telah dijelaskan, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

Ha4 : Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap *audit delay*.

2.2 Kerangka Pemikiran

Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:



Gambar 2.6 Model Penelitian

UMMN

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA